

Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia

Arina Luthfiana¹, Alip Sugianto²

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jl. Budi Utomo No. 10
Ronowijayan, Kec. Ponorogo, 63471, Indonesia
[1arinafln@gmail.com](mailto:arinafln@gmail.com), [2sugiantoalip@gmail.com](mailto:sugiantoalip@gmail.com)
*corresponding author: arinafln@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received

Revised

Accepted

Keywords

Pandemi Covid-19

Pemulihan Ekonomi

Kebijakan Pemerintah

ABSTRACT

Setelah hampir tiga tahun mewabah di Indonesia, COVID-19 telah membawa banyak dampak di tiap aspek kehidupan manusia dan menjadi konsen utama masyarakat. Salah satu dampak terbesarnya ialah pertumbuhan ekonomi yang terhambat karena pemberlakuan pembatasan sosial. Kebijakan juga diberlakukan bagi warga asing yang ingin masuk ke Indonesia, dan kewajiban karantina mandiri bagi WNI yang pulang dari luar negeri. Pembatasan aktivitas individual ini berdampak di berbagai sektor khususnya sektor pariwisata. Selain penerapan sistem *physical* dan *social distancing*, pemerintahan juga mengesahkan kebijakan baru yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM yang menyebabkan banyak mata pencaharian terkendala dalam pelaksanaannya. Banyak pelaku UMKM dan pariwisata yang mengalami pemerosotan pemasukan karena daya beli masyarakat yang rendah, penutupan lokasi promosi produk UMKM seperti *car free day* dan pasar minggu, serta sulitnya mendapat bahan baku produksi. Di lain sisi, terdapat pula pekerja maupun karyawan perusahaan yang terpaksa dirumahkan atau mendapat surat pemutusan hubungan kerja. Wabah yang memengaruhi kondisi sosial ini memerlukan strategi khusus untuk memulihkan kembali pertumbuhan ekonomi. Penelitian paper ini menggunakan menggunakan riset kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan artikel dan referensi buku-buku terkait seputar topik yang ditulis. Sementara itu, usaha penstabilan yang diambil pemerintah di sektor UMKM adalah penyuluhan untuk para pelaku usaha, pembiayaan modal kerja, pemberian insentif perpajakan, pelatihan secara daring, serta restrukturisasi kredit dalam rangka membantu debitur untuk meringankan beban pembayaran angsuran dan berpotensi mengalami kesulitan dalam kondisi tertentu. Beberapa efektivitas yang telah dijalankan ialah membuka program baru yang disebut Kartu Prakerja, subsidi bantuan langsung tunai, sembako, dan insentif tarif listrik.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



A. Pendahuluan

Kasus terdampak COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) pertama kali dilaporkan pada awal maret tepatnya di tahun 2020 di kota Depok, Jawa Barat. Virus yang ditemukan di negara Tiongkok ini bemutasi begitu cepat dan menyebabkan kerapuhan drastis di hampir tiap negara, Bidang kesehatan yang berperan besar di masa pandemi menunjukkan betapa banyak angka kasus yang naik hingga tidak meratanya fasilitas kesehatan. Negara-negara di dunia yang terjangkit wabah ini, mendadak mengumumkan kebijakan baru dalam upaya pengendalian penyebaran infeksi Covid-19, yakni

lockdown. Pemerintah mengambil tindakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) yang bertujuan memutus rantai penyebaran virus, layaknya sistem *social distancing*. Usaha pemerintah dalam menghentikan penyebaran ini dimulai dengan pengupayaan aktivitas daring yang dikenal dengan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) untuk siswa/i dan mahasiswa/i. Sementara itu, dalam dunia perkantoran menggunakan sistem WFH (*Work from Home*) dalam skala nasional yang mengandalkan teknologi. Efek dari beberapa kebijakan tersebut masuk ke berbagai lini kehidupan, tak hanya sisi pendidikan dan kesehatan namun juga kehidupan bersosial seperti penundaan kegiatan kemasyarakatan.

Tak menampik fakta bahwa PSBB membawa dampak tersendiri, terkhusus di sektor ekonomi. Berdasarkan laporan *International Monetary Fund* (IMF), pertumbuhan ekonomi global mengalami downgrade dan mendarat di angka minus. Hal ini masuk akal mengingat penerapan anjuran pembatasan sosial yang membuat masyarakat tetap berada di rumah dan mengakses segala hal seperti; pendidikan, pekerjaan, hiburan bahkan pemenuhan kebutuhan melalui teknologi komunikasi. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) juga mengungkapkan jika pandemi kali ini mengancam kestabilan ekonomi dan memungkinkan timbulnya krisis usai terhentinya berbagai aktivitas di banyak negara. Juga tingkat konsumsi yang menurun serta lunturnya kepercayaan konsumen. Bahkan pengaruh krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 tidak lebih besar dari krisis pandemi global ini. Di tahun 1998 saat krisis moneter berkejolak, dampak hanya dirasakan pada beberapa sektor tertentu, yang ditandai pemerosotan nilai penukaran rupiah dan merendahnya harga jual barang. Dampak krisis pandemi ini mempunyai jangkauan lebih luas, yakni di skala makro maupun mikro. Misalnya seperti tidak stabilnya sisi produksi yang menurun ke rantai distribusi dan berkurangnya konsumsi masyarakat. Berdasarkan hukum penawaran dan permintaan, kondisi masyarakat yang banyak menghabiskan waktu di rumah di situasi *lockdown*, perlahan menyebabkan penurunan permintaan yang memengaruhi angka jumlah produksi untuk terus menurun. Situasi berantai yang mengguncang kondisi ekonomi ini juga dapat mengganggu mekanisme kelancaran pasar antara permintaan dan penawaran yang sulit untuk kembali berjalan normal. Mengingat *supply*, *demand* dan *supply-chain* yang berperan sebagai aspek vital ekonomi telah terganggu, maka masyarakat tak dapat mengelak dari dampak krisis yang tersebar merata ke seluruh lapisan. Dampak riil di sektor ekonomi di skala mikro akan merambat ke sektor keuangan karena banyak *investee* yang berpotensi mengalami kesulitan untuk membayar investornya. Sebagian besar efek buruk yang melanda kesejahteraan masyarakat bersumber pada resesi ekonomi global karena rantai pasokan yang terhambat dan melanda pasar keuangan. Pandemi yang muncul di luar prediksi ini belum menunjukkan kepastian keberakhiran serta perlu waktu bagi dunia untuk kembali memulihkan diri dari kondisi krisis ini. Banyak orang berspekulasi bahwa pandemi akan menciptakan perubahan permanen dalam pola kerja masyarakat, bersosial, politik, kesehatan, keamanan, produksi, perdagangan, pertanian, dan berbagai aspek lain. Dikarenakan virus pandemi ini suatu hal baru di dunia, maka berkemungkinan besar bagi beberapa negara mengharuskan pemerintahannya untuk mengembangkan strategi baru dalam memulihkan kondisi untuk kembali normal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pemulihan Ekonomi Nasional

Terjadinya resesi maupun krisis ekonomi membuat pemerintah semakin optimis untuk melancarkan beberapa kebijakan baru sambil membangun kembali pondasi kerjasama untuk mencapai pemulihan yang holistik. Keberlangsungan kebijakan tersebut harus mendapat *full-support* dari pemerintah daerah sebagai komunikator ke masyarakat. Pemda berada di posisi strategis karena memiliki pemahaman kondisi sosial masyarakat, struktur ekonomi daerah, dan demografi. Sehingga lebih leluasa mendorong efektivitas dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat disinergikan ke masyarakat daerah. Penanggulangan dampak krisis ekonomi yang berupa pengangguran dan kemiskinan dapat diawali dengan perencanaan strategi yang tepat untuk realisasi pembangunan. Tahapan pertama yang wajib ditetapkan ialah prioritas atas properti yang akan dibangun. Kemudian melakukan *crosscheck* atas ketersediaan sumber daya, baik SDA maupun SDM dan aktualisasi keadaan di lapangan. Ketiga, riset mengenai kekhasan atau

karakteristik daerah tersebut; hal ini menjadi faktor keberhasilan pembangunan daerah karena pemerintah menggantungkan hampir tiap aspek penting pada apa yang tersedia di suatu daerah.

Subsidi Pemerintah

Subsidi dapat didefinisikan sebagai jumlah bantuan pemerintah yang berupa keuangan, dalam rangka mendorong kuantitas produksi atau pembelian barang. Subsidi berperan peranan krusial dalam perekonomian negara, karena termasuk salah satu instrumen yang memengaruhi kuantitas output dan input, serta harga dari bermacam jenis komoditas dalam laju perekonomian. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa subsidi masuk dalam kelompok aspek penting agar tujuan perekonomian negara dapat tercapai. Hal ini dilaksanakan dengan penyaluran instrumen subsidi hingga menggeser kurva permintaan naik ke atas untuk konsumsi bersubsidi maupun kurva penawaran turun ke bawah untuk subsidi produksi. Berdasarkan penerimanya; yakni produsen dan konsumen, benefit subsidi dapat diklasifikasikan seperti: subsidi bahan pangan untuk kaum masyarakat menengah kebawah, subsidi listrik di sector pertanian dan domestik lain, subsidi pendidikan yang dipersiapkan dalam rangka membentuk generasi penerus yang cerdas dan berkualitas, dengan mengalokasikan dana untuk pendidikan dasar. Contoh lain adalah subsidi kesehatan yang dialokasikan untuk masyarakat golongan ekonomi lemah untuk membantu meringankan biaya fasilitas kesehatan agar tak terbebani.

C. Pembahasan

Keadaan yang melanda hampir tiap negara di dunia selama hampir tiga tahun terakhir merupakan problematika yang tanpa terduga menjadi ancaman dan harus dihadapi masyarakat. Pergolakan ekonomi yang tidak stabil membuat masyarakat berpikir ulang pasal bagaimana cara mereka bertahan hidup dan kembali ke kondisi normal. Tak hanya pemberlakuan pembatasan, keadaan sosial yang berputar membawa dampak luar biasa, yang mana membuat sektor perekonomian mengalami penurunan, dan rakyat menggantungkan harapan pada kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengembalikan terhadap kesejahteraan penduduknya di tengah menyikapi bencana ini. Beberapa upaya diberlakukan dalam usaha peningkatan pendapatan skala nasional demi mencapai titik terang kelangsungan hidup masyarakat serta kemajuan negara. Pemerintah mengupayakan pemulihan ekonomi nasional usai mengambil keputusan pada kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Pada sisi lain, pemerintah mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk memulihkan kembali kestabilan ekonomi hampir tujuh ratus triliun rupiah. Diharapkan pada triwulan III, ekonomi nasional tidak mengalami kontraksi besar seperti triwulan II, dan pemulihan ekonomi nasional telah merata serta dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat meskipun pertumbuhan tak mengarah positif. Kemudian di triwulan IV, pemerintah mengharap pertumbuhan positif ekonomi nasional mampu menekan hingga kontraksi di tahun 2020 sekecil mungkin. Sedangkan pada 2021, ekonomi nasional perlahan mulai memulih/*recovered* secara signifikan. Demi mencapai tujuan tersebut, ada tiga kebijakan yang ditetapkan yakni meningkatkan *rate* konsumsi di dalam negeri, aktivitas global serta menjaga keseimbangan ekonomi juga ekspansi moneter. Kebijakan tadi dilaksanakan secara bersamaan dan bersinergi antara pemegang kebijakan moneter, kebijakan fiskal serta institusi terkait. Sebagian besar pendapatan nasional negara didapat dari beberapa sektor hasil produksi, tenaga kerja, kewirausahaan, modal, dan tanah. Di lain sisi, masyarakat serta pelaku UMKM mempunyai peran yang strategis juga dalam memulihkan perekonomian nusantara. Pemberian stimulus moneter dan fiskal, seyogyanya diterima dengan tangan terbuka oleh pelaku usaha agar mampu menggerakkan usahanya kembali secara optimal. Contoh riil usaha penggerakan ekonomi nasional ialah konsumsi dalam negeri, sebab semakin tinggi daya beli maka ekonomi akan beranjak. Konsumsi tak lepas dari andil masyarakat oleh karena itu, pemerintah sudah mengalokasi anggaran sebanyak Rp172,1 triliun demi membantu konsumsi dan kemampuan daya beli rakyat. Penyaluran dana tadi dilakukan melalui donasi secara Tunai, pembebasan listrik, Program Prakerja, dan lain-lain. Detail efektivitas subsidi yang disalurkan pemerintah antara lain:

1. Bantuan sembako

Pemerintah mengawali subsidi bantuan dengan menyalurkan paket sembako di musim awal pandemi. Di masa awal April, Presiden Jokowi merilis pengumuman pasal penyaluran bantuan bagi warga Jabodetabek yang melingkupi DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah mengalokasikan anggaran paket sembako untuk wilayah DKI dengan total Rp 2,2 triliun untuk diberikan kepada 1,2 juta keluarga yang per paketnya senilai Rp 600.000. Sementara itu, bansos sembako disalurkan ke 576.000 keluarga bagi wilayah Bodetabek yang mempunyai total sama dengan yakni Rp 600.000 per bulan. Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp 1 triliun. Perencanaan pemberian bansos selama bulan April hingga Juni, diperpanjang hingga Desember 2020 karena menyesuaikan situasi.

2. Bantuan Langsung Tunai

Sama seperti paket sembako, BLT ini dikururkan sejak musim awal pandemi. Letak perbedaan ada pada bentuk bantuan ini diberikan. BLT diberikan dalam bentuk uang tunai untuk menysar warga yang tinggal di luar Jabodetabek alih-alih sembako. Penerima BLT ini menerima dana tunai sebesar Rp 600.000 selama di 3 bulan awal munculnya COVID-19 yakni April, sampai dengan Juni. Program bantuan ini mengalami ekstensi hingga Desember namun, pemberian nilai uang direduksi hingga menjadi Rp 300.000. Menteri Sosial, Juliari Batubara mengatakan bahwa pemberian subsidi diperuntukkan kepada seluruh keluarga menurut sistem data terpadu milik Kementerian Sosial. Keluarga yang berhak adalah yang telah memenuhi syarat antara lain; belum pernah menerima bansos lain layaknya Program Keluarga Harapan (PKH), program Prakerja maupun Bantuan Pangan Nontunai. Selain dari data Kemensos, bantuan juga dikordinir pemerintah melalui pemerintah daerah. Berdasarkan laporan MenKeu, Sri Mulyani, paling tidak ada 9 juta keluarga yang telah mendapat bantuan ini. Bantuan diberikan melalui media transfer ke rekening penerima masing-masing atau pengiriman PT Pos Indonesia.

3. Insentif tarif listrik

Selain paket sembako dan BLT, pemerintah mengucurkan bantuan insentif tarif listrik berupa diskon listrik, pembebasan tagihan, penghapusan biaya minimum dan abonemen. Insentif diskon dan pembebasan tagihan listrik ditujukan bagi golongan rumah tangga dengan 450 VA serta subsidi 900 VA. Stimulus ini berlaku selama April hingga Juni. Tetapi, insentif ini juga diperpanjang hingga bulan terakhir secara kondisional. Berdasarkan sistem data pemerintah, kurang lebih 31,8 juta pelanggan penerima insentif ini. Skala program bantuan ini juga diperluas pemerintah agar menjangkau pelaku UMKM.

4. Bantuan Langsung Tunai dana desa

Melalui Kemendes PDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), pemerintah mengatur sebagian dari anggaran desa menjadi BLT atau bantuan langsung tunai. Penyaluran bantuan tersebut dibagi menjadi dua gelombang. Tap gelombang terdiri dari 3 tahapan. Gelombang pertama disalurkan di bulan April sebagai tahap I, lalu tahap II di bulan Mei, dan terakhir tahap III di bulan Juni. Dana sebesar Rp 600.000 disalurkan pada setiap keluarga penerima manfaat (KPM) di setiap bulannya. Kemudian gelombang kedua disalurkan dari bulan Juli hingga September. Nominal bantuan gelombang dua ini lebih rendah dari yang sebelumnya, yaitu hanya Rp 300.000/bulan. Penyaluran BLT Dana Desa di tahap I telah terealisasi di 74.877 desa dengan sasaran sebanyak 7.426.707 KPM. Jumlah anggaran yang tersalurkan untuk bantuan ini sebesar Rp 4,69 Triliun. Sedangkan di tahap kedua, total 64.515 desa juga sukses menyalurkan BLT mencapai Rp 4,05 triliun untuk hampir tujuh juta KPM.

5. Subsidi Gaji Karyawan

Subsidi gaji digulirkan bagi pegawai honorer dan pekerja swasta. Karyawan penerima bantuan ini harus yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dengan standar gaji di bawah Rp 5 juta. Bantuan senilai Rp 600.000 per bulan diberikan pada penerima subsidi gaji selama 4 bulan. Penyaluran subsidi dilakukan sekali tiap 2 bulan, atau Rp 1,2 juta untuk setiap penyalurannya. Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program ini mencapai Rp 37,7 triliun. Pemerintah menghimbau perusahaan untuk menyampaikan data dari nomor rekening pekerja penerima subsidi.

6. Kartu Prakerja

Perilisan Program Kartu Prakerja dilakukan pada 2020 di pertengahan April. Program ini ditujukan bagi karyawan terdampak Covid-19 yang ter-PHK, pelaku usaha mikro yang terdampak, dan pengangguran. Peserta program tersebut mendapat insentif total Rp 3.550.000 dengan mendaftar di website resmi Pra-kerja. Angka tersebut mencakup dari 3 bagian yakni, insentif Rp 1.000.000 sebagai biaya pelatihan daring yang melibatkan 8 pihak sebagai mitra pemerintah yang tak dapat dicairkan. Kemudian, insentif pasca-training senilai Rp 600.000 per bulan yang diberikan selama 4 bulan hingga tiap peserta mendapat Rp 2.400.000. Terakhir, insentif untuk evaluasi pelatihan usai pengisian survei senilai Rp 50.000. Pengisian survey dilakukan bagi peserta yang selesai pelatihan sebanyak 3 kali dengan insentif sebesar Rp 150.000.

7. Kuota gratis

Siswa, mahasiswa, guru, dan dosen juga tak lepas dari konsen pemerintah untuk memberikan bantuan berupa paket data selama masa periode Study From Home atau Pembelajaran Jarak Jauh. Pelajar atau siswa sekolah berhak menerima subsidi kuota sebanyak 35 GB/bulan. Sedangkan besaran kuota yang diperoleh kelompok guru ialah 42 GB per bulan. Mahasiswa dan dosen yang tak luput dari bantuan kuota gratis ini berhak menerima sebanyak 50 GB per bulannya.

8. BLT UMKM

BLT juga diberikan pada pelaku UMKM secara khusus. Nominal BLT yang diberikan sebanyak Rp 2,4 juta untuk tiap pelaku usaha. Penyaluran dilakukan dalam satu kali transfer, ke nomor rekening yang terdata. Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi pihak yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan bantuan dengan anggaran yang disiapkan yakni sebesar Rp 22 triliun.

9. Bantuan pulsa ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak luput dari perhatian Kemenkeu juga mendapat memberikan tunjangan pulsa dengan kisaran tunjangan sebesar Rp 200.000 hingga Rp 400.000. ASN yang juga dalam periode bekerja dari rumah atau WFH mendapat bantuan senilai Rp 200.000 per bulan. Nominal tersebut diberikan kepada pejabat tingkat eselon II/setara dan ke bawah. Sementara itu pulsa senilai Rp 400.000/bulan dihibahkan pada pejabat eselon I dan II/setara. Keputusan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 394/KMK.02/2020 yang terbit tanggal 31 Agustus 2020.

Meski banyak bantuan telah diturunkan, masih ada masyarakat yang kondisi perekonomiannya belum kembali normal. Ada beberapa faktor, yakni bertambahnya masyarakat yang pendapatannya menyusut saat pandemi disusul dengan Pemutusan Hubungan Kerja dan UMKM yang gulung tikar. Kemudian, menurunnya kemampuan daya beli masyarakat yang menyebabkan rantai ekonomi terganggu. Terakhir, penyaluran bantuan yang cenderung tak dilaksanakan secara kontinyu, dan terjadinya miskomunikasi yang menyebabkan penyaluran bantuan tidak merata. Beberapa bantuan seperti BLT yang besarnya mencapai Rp 600.000 hanya diluncurkan di tiga bulan awal pandemi, lalu berkurang hingga setengah. Namun, pemerintah tak berhenti untuk turun tangan. Strategi pemulihan ekonomi nasional terus diluncurkan melalui beberapa kebijakan, salah satunya *New Normal* yang membebaskan rakyat dari lockdown dan kembali beraktivitas meskipun belum seratus persen kembali seperti semula. Pemerintah juga memanfaatkan realisasi APBN/APBD untuk mendorong konsumsi kementerian/pemda/lembaga. Konsumsi ini pula diarahkan demi memberikan *multiplier effects* signifikan mungkin untuk produk dalam negeri atau lokal. Usaha pemerintah mengupayakan pemberian stimulus/insentif kepada Korporasi dan UMKM. Untuk sektor UMKM, pemerintah menjadwalkan penundaan angsuran dan mensubsidi bunga kredit perbankan. Serta subsidi bunga bersama Ultra Mikro dan KUR (Kredit Usaha Rakyat), Rp10 miliar sebagai penjaminan modal kerja sekaligus pemberian insentif pajak, contohnya Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21). Di sektor korporasi, pemberian insentif pajak yakni pembebasan PPh Pasal 22 untuk impor, reduksi nominal angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai; penempatan dana Pemerintah untuk restrukturisasi debitur di perbankan. Sementara itu, penjaminan modal kerja bagi korporasi prioritas maupun padat karya juga diberikan dalam rangka mengembalikan kondisi ekonomi nasional, yang didorong oleh Bank Indonesia dengan menjaga kestabilan nilai tukar mata uang Rupiah, menurunkan

suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, stabilisasi system keuangan serta makroekonomi. Meskipun perlahan, pembangunan kembali kondisi ekonomi nasional terlihat dengan ramainya tempat-tempat dan pusat perbelanjaan maupun lokasi promosi yang dipenuhi pelaku UMKM untuk kembali menggelar roda perekonomian yang sempat macet usai hamper 2 berada ditengah pandemic Covid-19.

D. Metodologi Penelitian

Penelitian yang diterapkan adalah kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (*library research*). Pemanfaatan buku, jurnal, dan literatur lain menjadi objek referensi utama dalam penyusunan tulisan. Penelitian kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang pelaksanaannya menghasilkan informasi dalam bentuk data deskriptif yang tertuang dalam teks dan catatan (Mantra, 2008: 30). Analisis perlu dilakukan dengan tujuan memberikan keterangan serta gambaran secara gamblang namun tetap bersifat kritis, sistematis dan mengesampingkan pandangan subjektif.

E. Kesimpulan

Tahun 2020 merupakan awal tak terduga bagi hampir tiap negara untuk menangani krisis dari berbagai sektor yang presentasinya menurun drastis. Berbagai upaya yang dikerahkan pemerintah mulai dari pemberlakuan pembatasan sosial dan memfasilitasi masyarakat untuk karantina merupakan bentuk dari pencegahan agar kondisi negara kembali pulih. Menjadi garda terdepan bagi masyarakat yang terpapar virus, memulai kebijakan baru untuk menstabilkan ekonomi, penyaluran dana kepada sektor pelaku swasta dan UMKM, restrukturisasi debitur hingga aspek terkecil seperti bantuan kuota diluncurkan sebagai bentruk strategi pemerintah dalam memulihkan kesejahteraan rakyat. Usaha dalam memberikan pelatihan daring dan pengembangan pada sumber daya manusia yang ter-PHK maupun non-pekerja merupakan langkah yang menjadi penggerak demi menghasilkan indutsri yang bernilai dan mampu menambah catatan pendaparan bagi negara. Tidak hanya pemerintah yang berusaha menciptakan pembaharuan pada upaya pemulihan ini, namun juga masyarakat yang turut andil dalam melaksanakan tiap tugas untuk kembali ke situasi normal.

F. References

- Habli Zainal, S. K. (2021). Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Di Masa Pasca Pandemi. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 34-43.
- Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 103-116.
- Moh. Musfiq Arifqi, D. J. (2021). Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, 195-205.
- Nasrun, M. A. (2020). Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020*, 32-40.
- Sutrisno, E. (2021). Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor Umkm Dan Pariwisata. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia*.
- Chusna, F. (2020). *Melihat Efektivitas 9 Bantuan dan Subsidi Pemerintah Selama 6 Bulan Pandemi*. Jakarta: Kompas.